



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH
DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM
YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian rincian subkegiatan yang dapat didanai dari dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum sesuai dengan usulan dari kementerian/lembaga terkait, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) diubah sehingga menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan kegiatan dan subkegiatan yang didanai dari dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dalam anggaran pendapatan belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk tahun anggaran 2025.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT
KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA
ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

A. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI UMUM DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN

Dana alokasi umum dukungan bidang pendidikan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai jenis kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung sebagaimana tersedia dalam tabel berikut.

Khusus untuk pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, jenis kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung yang didanai dari dana alokasi umum dukungan bidang pendidikan disesuaikan dengan pembagian kewenangan provinsi/kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan untuk Provinsi

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Asrama Sekolah
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Fasilitas Parkir
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Kantin Sekolah
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
11	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
12	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
13	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
14	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Mebel Sekolah
16	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
17	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
18	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
19	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
20	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
21	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
22	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
23	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
24	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
25	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
26	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
27	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
29	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemeliharaan Mebel
30	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas
31	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
32	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
33	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
34	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
35	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
36	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
37	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan infrastruktur TIK
38	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
39	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
40	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
41	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
42	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah
43	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Laboratorium
44	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
45	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru
46	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
47	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
48	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
49	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penataan Ruang/Sudut Baca
50	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
51	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
52	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
53	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
54	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
55	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
56	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
57	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Laboratorium
58	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
59	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
60	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
61	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Asrama Sekolah
62	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
63	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Fasilitas Parkir
64	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Kantin Sekolah
65	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
66	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
67	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
68	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Mebel Sekolah
69	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
70	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
71	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
72	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
73	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
74	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
75	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
76	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
77	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
78	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
79	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
80	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
81	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
82	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemeliharaan Mebel
83	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
84	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
85	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
86	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
87	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
88	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK
89	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
90	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan infrastruktur TIK
91	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
92	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik
93	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
94	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
95	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
96	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
97	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
98	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula
99	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah
100	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penataan Ruang/Sudut Baca
101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
103	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah
104	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik
105	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
106	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
107	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah
108	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
109	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
110	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
111	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
112	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
113	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
114	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
115	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
116	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Asrama Sekolah
117	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
118	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Fasilitas Parkir
119	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Kantin Sekolah
120	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Laboratorium
121	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
122	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
123	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
124	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
125	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
126	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
127	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
128	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
129	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
130	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
131	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
132	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
133	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Mebel Sekolah
134	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
135	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
136	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
137	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
138	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
139	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
140	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
141	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
142	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
143	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
144	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
145	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
146	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
147	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pemeliharaan Mebel
148	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
149	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
150	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
151	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
152	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
153	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus
154	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan infrastruktur TIK
155	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penataan Ruang/Sudut Baca
156	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik
157	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
158	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
159	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
160	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
161	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Kelas Baru
162	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
163	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
164	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
165	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
166	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
167	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah
168	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah
169	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
170	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
171	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
172	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
173	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus
174	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
175	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
176	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
177	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
178	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
179	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah
180	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah
181	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
182	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus
183	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
184	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
185	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus
186	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus
187	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
188	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
189	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
190	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua
191	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah di Papua
192	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
193	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
194	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
195	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
196	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
197	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi
198	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
199	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
200	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
201	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi
202	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
203	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi
204	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah
205	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah
206	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah
207	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri
208	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembinaan Manajemen Dayah
209	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Penelitian dan Pengembangan Dayah
210	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah
211	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah
212	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah
213	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah
214	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren
215	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi Pendirian Sekolah Tinggi/Ma'had 'Aly
216	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi Akreditasi Sekolah Tinggi/Ma'had 'Aly
217	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian
218	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
219	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah
220	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi
221	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
222	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Penetapan Standar Pendidikan Aceh
223	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh
224	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh
225	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
226	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh
227	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh
228	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh
229	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
230	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
231	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah
232	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami
233	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah
234	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan
235	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi
236	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
237	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh
238	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
239	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan untuk Provinsi

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
2	Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
6	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
7	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
8	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
11	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
12	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
13	Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Provinsi	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan
14	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
15	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
16	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/K	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
17	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/K	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
18	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal
19	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal
20	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal
21	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK
22	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
23	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
24	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
25	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
26	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
27	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
28	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
29	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
30	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
31	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
32	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
33	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi
34	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
35	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Seleksi Atlet Daerah
36	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
37	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)
38	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
39	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
40	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
41	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi
42	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
43	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
44	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
45	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi
46	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
47	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
48	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
49	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
50	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
51	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
52	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
53	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
54	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
55	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
56	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
57	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
58	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
59	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
60	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
61	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
62	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
63	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
64	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
65	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal
66	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
67	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Penetapan Cagar Budaya
68	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pelindungan Cagar Budaya
69	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pengembangan Cagar Budaya
70	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pemanfaatan Cagar Budaya
71	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
72	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
73	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
74	Pengelolaan Museum Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
75	Pengelolaan Museum Provinsi	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
76	Pengelolaan Museum Provinsi	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
77	Pengelolaan Museum Provinsi	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
78	Pengelolaan Museum Provinsi	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
79	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional
80	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi
81	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Sosialisasi Adat Istiadat
82	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pembinaan Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan
83	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh
84	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang
85	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Pelatihan Peradilan Adat
86	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)
87	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Pembinaan Mediasi Adat
88	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat
89	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan
90	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat
91	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Rapat Kerja MAA
92	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat
93	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat
94	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat
95	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
96	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
97	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
98	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
99	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
100	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya
101	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
102	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
103	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan
104	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
105	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
106	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
107	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
108	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Lumbung Mataraman
109	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
110	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Industri Kreatif
111	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
112	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Budaya Bahari
113	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram
114	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional
115	Pendidikan Berbasis Budaya	Pembinaan Muatan Lokal
116	Pendidikan Berbasis Budaya	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
117	Pendidikan Berbasis Budaya	Kependidikan Kepramukaan
118	Pendidikan Berbasis Budaya	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta
119	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
120	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat
121	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat
122	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat
123	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat
124	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga
125	Penyelenggaraan Desa Adat	Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan
126	Penyelenggaraan Desa Adat	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan
127	Penyelenggaraan Desa Adat	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan
128	Pembinaan Sumber Daya Manusia	Pembinaan Prajuru Desa Adat
129	Pembinaan Sumber Daya Manusia	Pembinaan Pendidikan Pasraman
130	Pembinaan Sumber Daya Manusia	Pembinaan SDM Lembaga Adat
131	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
132	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
133	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
134	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
135	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
136	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Perpustakaan Deposit
137	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
138	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
139	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
140	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi
141	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
142	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
143	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
144	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
145	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi
146	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
147	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Penerbitan Katalog Induk Daerah
148	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Penerbitan Bibliografi Daerah
149	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
150	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
151	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
152	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
153	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
154	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
155	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
156	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
157	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
158	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner
159	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
160	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
161	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
162	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
163	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
164	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyuluhan Transmigrasi
165	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pelatihan Transmigrasi
166	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
167	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
168	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
169	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
170	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
171	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata
172	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga
173	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyediaan Bantuan Akhir Studi
174	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata
175	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah
176	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)
177	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya
178	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
179	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
180	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
181	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
182	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
183	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
184	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
185	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
186	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
187	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
188	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
189	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
190	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
191	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
192	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
193	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
194	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
195	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
196	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
197	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
198	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
199	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
200	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Pelatihan Mawaris
201	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas
202	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam
203	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru`yat
204	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Seminar Problematika Syariat Islam
205	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat
206	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran
207	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran	Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran
208	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran	Pembinaan Imam Hafid pada Masjid
209	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran	Pelaksanaan MTQ

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
210	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional
211	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran	Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional
212	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam
213	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakakan Syariat Islam
214	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil
215	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan
216	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
217	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh
218	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam
219	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat
220	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong
221	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman
222	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam
223	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah
224	Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam
225	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman
226	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturrahman
227	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman
228	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturrahman Aceh
229	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama
230	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Pendidikan Kader Ulama
231	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya
232	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Nadwah/Mubahasah Ilmiah
233	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
234	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Kajian Pedoman Keagamaan
235	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota)
236	Silaturahmi Ulama-Ulama	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah
237	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF
238	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota
239	Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
240	Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe
241	Peradaban dan Tamadhun Aceh	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat
242	Peradaban dan Tamadhun Aceh	Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri
243	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah

3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota

NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
11	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah
12	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
13	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
14	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
16	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
17	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
18	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
19	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
20	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
21	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
22	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
23	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemeliharaan Mebel Sekolah
24	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar
25	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
26	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
27	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
29	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
30	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
31	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan infrastruktur TIK
32	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
33	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penataan Ruang/Sudut Baca
34	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
35	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
36	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru
37	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
38	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
39	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
40	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
41	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
42	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
43	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
44	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
45	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Mebel Sekolah
46	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
47	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
48	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
49	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
50	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
51	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
52	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
53	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
54	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium
55	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
56	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Asrama Sekolah
57	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
58	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
59	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Fasilitas Parkir
60	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Kantin Sekolah
61	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
62	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemeliharaan Mebel Sekolah
63	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
64	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
65	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
66	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
67	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
68	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
69	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
70	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah
71	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
72	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
73	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
74	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
75	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
76	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
77	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama
78	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
79	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
80	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
81	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
82	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
83	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
84	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
85	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penataan Ruang/Sudut Baca
86	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
87	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru
88	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
89	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
90	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
91	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah
92	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
93	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
94	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus

NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
95	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
96	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan infrastruktur TIK
97	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
98	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Mebel PAUD
99	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
100	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan PAUD
101	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
102	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
103	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
104	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
105	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
106	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD
107	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
108	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pemeliharaan Mebel Sekolah
109	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
110	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
111	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN
112	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
113	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
114	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
115	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Kelas Baru
116	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan infrastruktur TIK
117	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penataan Ruang/Sudut Baca
118	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
119	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
120	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
121	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
122	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
123	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
124	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
125	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
126	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
127	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
128	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
129	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
130	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
131	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
132	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
133	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
134	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
135	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
136	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
137	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
138	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
139	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
140	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
141	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
142	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
143	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
144	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
145	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
146	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
147	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
148	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
149	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
150	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
151	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
152	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
153	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
154	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan infrastruktur TIK

NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
155	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Ruang/Sudut Baca
156	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
157	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
158	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
159	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
160	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
161	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
162	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
163	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
164	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
165	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
166	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
167	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
168	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Laboratorium
169	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Mebel Sekolah
170	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
171	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal
172	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
173	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
174	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
175	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
176	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
177	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat
178	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat
179	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
180	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
181	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
182	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
183	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
184	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar
185	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
186	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar

NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
187	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
188	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
189	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
190	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
191	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
192	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
193	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
194	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
195	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
196	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
197	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
198	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
199	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
200	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota
201	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
202	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota
203	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota
204	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
205	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
206	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah
207	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah

NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
208	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah
209	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah
210	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri
211	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembinaan Manajemen Dayah
212	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Penelitian dan Pengembangan Dayah
213	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah
214	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah
215	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah
216	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren
217	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian
218	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
219	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah
220	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi
221	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
222	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Penetapan Standar Pendidikan Aceh
223	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh
224	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh
225	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh
226	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh
227	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
228	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
229	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah
230	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami
231	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah
232	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan
234	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada

NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
		Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Provinsi
235	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
236	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh
237	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
238	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota

NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
2	Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
5	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
6	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
7	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
8	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
9	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
10	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
11	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
12	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
13	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
14	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
15	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
16	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
17	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
18	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
19	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
20	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
21	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
22	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
23	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
24	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
25	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
26	Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan
27	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
28	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembagamasyarakat/komunitas/keompok masyarakat
29	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
30	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
31	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
32	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
33	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
34	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
35	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
36	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
37	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
38	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
39	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat
40	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
41	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
42	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota

NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
	Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
43	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota
44	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
45	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota
46	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
47	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota
48	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota
49	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
50	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
51	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
52	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota
53	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
54	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Seleksi Atlet Daerah
55	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
56	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)
57	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
58	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota
59	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota
60	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait

NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
61	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
62	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
63	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
64	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
65	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
66	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
67	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
68	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
69	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
70	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
71	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
72	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
73	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan
74	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
75	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional
76	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Kewirausahaan Desa
77	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa
78	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
79	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
80	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
81	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
82	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
83	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
84	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
85	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
86	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
87	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
88	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
89	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
90	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
91	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat

NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
92	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
93	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
94	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
95	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
96	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
97	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Pelaksanaan MTQ
98	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Pendidikan Kader Ulama
99	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
100	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
101	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
102	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
103	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
104	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
105	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
106	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
107	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
108	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
109	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
110	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
111	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
112	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
113	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
114	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya
115	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya
116	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Cagar Budaya
117	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Cagar Budaya

NO	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
118	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
119	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
120	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
121	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
122	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
123	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
124	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
125	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional
126	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi
127	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Sosialisasi Adat Istiadat
128	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pembinaan Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan
129	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh
130	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang
131	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Penguatan Peradilan Adat
132	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)
133	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Pembinaan Mediasi Adat
134	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat
135	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pembinaan Kapasitas MAA
136	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat
137	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Rapat Kerja MAA
138	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat
139	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat
140	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat
141	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah

B. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI UMUM DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN

Dana alokasi umum dukungan bidang kesehatan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai jenis kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung sebagaimana tersedia dalam tabel berikut.

1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan untuk Provinsi

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
6	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
7	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Rumah Sakit
10	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
11	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
12	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
13	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
14	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
15	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
17	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
18	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
19	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
20	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
21	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
22	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
23	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
24	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
25	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
26	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
27	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB
28	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria
29	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
30	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
31	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
32	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
33	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
34	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya untuk Wahana Pendidikan

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
35	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi
36	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
37	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
38	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
39	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
40	Penyelenggaraan Akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
41	Penyelenggaraan Akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)
42	Penyelenggaraan Akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)
43	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
44	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
45	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
46	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
47	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
48	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
49	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
50	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
51	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
52	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
53	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
54	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
55	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
56	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
57	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
58	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
59	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
60	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
61	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
62	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
63	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan untuk Provinsi

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan
6	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang
7	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
8	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
12	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu
13	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
14	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
15	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
16	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Sandang
17	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
18	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
19	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
20	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Sandang
21	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
22	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
23	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan
24	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Sandang
25	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
26	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
27	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
28	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
29	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
30	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
31	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
32	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah

3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas
3	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas
5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
6	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
7	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit
10	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
11	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)
12	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
13	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
14	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
15	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
17	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
18	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
19	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
20	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
21	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
22	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
23	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
24	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
25	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
26	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
27	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
28	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
29	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
30	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
31	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
32	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
33	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
34	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
36	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
37	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
38	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
39	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
40	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
41	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
42	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Manajemen Puskesmas
43	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya
44	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
45	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
46	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota
47	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya
48	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
49	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
50	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
51	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
52	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
53	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
54	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman
55	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
56	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
57	Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota
58	Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota
59	Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di Kabupaten/Kota
60	Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota	Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain Kabupaten/Kota
61	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
62	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
63	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
64	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
65	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
66	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
67	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
68	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
69	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
70	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
71	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
72	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
73	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
74	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
75	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
76	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
77	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
78	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
79	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
80	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
81	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
82	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
83	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
84	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
85	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
86	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
87	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
88	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
89	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
90	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
91	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
92	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
93	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
5	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
6	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
7	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
8	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang
11	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
12	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
13	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
14	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
15	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
16	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
17	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
18	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
19	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
20	Penyimpanan sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
21	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
22	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
23	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
24	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
25	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana
26	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
27	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal
28	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana
29	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
30	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
31	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
32	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK
33	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
34	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
35	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
36	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
37	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
	serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
38	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
39	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
40	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
41	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
42	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
43	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
44	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
45	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
46	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
47	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan
48	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan KB Pria
49	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
50	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
51	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB
52	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
53	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
54	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Penanganan COVID -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
55	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Pembinaan Penanganan <i>COVID</i> -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
56	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
57	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
58	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
59	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
60	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
61	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
62	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
63	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
64	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
65	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
66	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD
67	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah

C. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI UMUM DUKUNGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

Dana alokasi umum dukungan bidang pekerjaan umum dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai jenis kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung sebagaimana tersedia dalam tabel berikut.

1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
7	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
10	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota
11	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan TPA/TPST/SPA
12	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Optimalisasi TPA/TPST/SPA
13	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
14	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembangunan TPA/TPST/SPA
15	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
16	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan
17	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
18	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA
19	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
20	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
21	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
22	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
23	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
24	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
25	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota
26	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
27	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
3	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
4	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Unit Air Baku
5	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
6	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Unit Air Baku
8	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
10	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
11	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
12	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
13	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendung Irigasi
14	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
15	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
16	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
17	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
18	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
19	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
20	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
21	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
22	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
23	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
24	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai
25	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
26	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendungan
27	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai
28	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
29	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
30	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kanal Banjir
31	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
32	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan <i>Polder</i> /Kolam Retensi
33	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Sabo

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
34	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan <i>Check Dam</i>
35	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan <i>Breakwater</i>
36	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
37	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan <i>Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</i>
38	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendungan
39	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai
40	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
41	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
42	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Kanal Banjir
43	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
44	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi <i>Polder</i> /Kolam Retensi
45	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bangunan Sabo
46	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi <i>Check Dam</i>
47	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi <i>Breakwater</i>
48	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
49	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tanggul Sungai
50	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
51	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
52	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kanal Banjir

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
53	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
54	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Polder/Kolam Retensi
55	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bangunan Sabo
56	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan <i>Check Dam</i>
57	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan <i>Breakwater</i>
58	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
59	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan <i>Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</i>
60	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Revitalisasi Danau
61	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai
62	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air
63	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
64	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
65	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
66	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
67	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan <i>Polder/Kolam Retensi</i>

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
68	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
69	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan <i>Check Dam</i>
70	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan <i>Breakwater/ Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
71	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
72	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
73	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
74	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
75	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Danau
76	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sungai
77	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
78	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
79	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendung Irigasi
80	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
81	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
82	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
83	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
84	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bendung Irigasi
85	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
86	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
87	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
88	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
89	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi
90	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
91	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
92	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
93	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi
94	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
95	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
96	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
97	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
98	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
99	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
100	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
101	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek
102	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
103	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
104	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
105	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
106	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
107	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pengelolaan Leger Jalan
108	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
109	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan
110	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar
111	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
112	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan
113	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jalan
114	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jalan
115	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan
116	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan
117	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan <i>Flyover</i>
118	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan <i>Underpass</i>
119	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Terowongan/ <i>Tunnel</i>
120	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penggantian Jembatan
121	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jembatan
122	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jembatan
123	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan
124	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jembatan
125	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
126	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
127	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah

3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa
7	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan
11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
13	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
14	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
15	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
16	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
17	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
18	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
19	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
20	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS
21	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
22	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
23	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
24	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
25	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
26	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
27	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
28	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
29	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
30	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota
31	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
32	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
33	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
34	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
35	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
36	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
37	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
38	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
39	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
40	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
41	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
42	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
43	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
44	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
45	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
3	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
4	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
5	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Unit Air Baku
6	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
8	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Unit Air Baku
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
10	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
11	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
12	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
	(WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
13	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
14	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
15	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendungan
16	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai
17	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
18	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
19	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kanal Banjir
20	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
21	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan <i>Polder</i> /Kolam Retensi
22	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Sabo
23	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan <i>Check Dam</i>
24	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan <i>Breakwater</i>
25	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
26	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan <i>Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</i>
27	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendungan
28	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai
29	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
30	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
31	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Kanal Banjir
32	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
33	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi <i>Polder</i> /Kolam Retensi
34	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bangunan Sabo
35	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi <i>Check Dam</i>
36	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi <i>Breakwater</i>
37	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
38	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tanggul Sungai
39	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
40	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
41	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kanal Banjir
42	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
43	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan <i>Polder</i> /Kolam Retensi
44	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bangunan Sabo
45	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan <i>Check Dam</i>
46	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan <i>Breakwater</i>
47	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	Peningkatan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
	(WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
48	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan <i>Flood Forecasting And Warning System</i> (FFWS)
49	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Revitalisasi Danau
50	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai
51	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
52	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
53	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
54	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
55	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
56	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan <i>Polder</i> /Kolam Retensi
57	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
58	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan <i>Check Dam</i>
59	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan <i>Breakwater/Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
60	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota
61	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
62	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
63	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
64	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Danau

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
65	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sungai
66	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
67	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
68	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
69	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendung Irigasi
70	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
71	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
72	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
73	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
74	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
75	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
76	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
77	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
78	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
79	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
80	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
81	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendung Irigasi
82	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
	Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
83	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
84	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
85	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
86	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
87	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bendung Irigasi
88	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
89	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
90	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
91	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
92	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
93	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
94	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
95	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
96	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
97	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
98	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
99	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem <i>Drainase</i> Perkotaan

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
100	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem <i>Drainase</i> Perkotaan
101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sistem <i>Drainase</i> Perkotaan
102	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem <i>Drainase</i> Perkotaan
103	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem <i>Drainase</i> Lingkungan
104	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem <i>Drainase</i> Lingkungan
105	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem <i>Drainase</i> Lingkungan
106	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem <i>Drainase</i> Lingkungan
107	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem <i>Drainase</i> Lingkungan
108	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem <i>Drainase</i> Lingkungan
109	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
110	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
111	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
112	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
113	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
114	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
115	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
116	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
117	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
118	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
119	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
120	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
121	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
122	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
123	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
124	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Gagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
125	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
126	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Leger Jalan
127	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
128	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan
129	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standar
130	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
131	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan
132	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan
133	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan
134	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan
135	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan
136	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan <i>Flyover</i>
137	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan <i>Underpass</i>
138	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Terowongan/ <i>Tunnel</i>

NO.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN
139	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penggantian Jembatan
140	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jembatan
141	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jembatan
142	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan
143	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
144	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jembatan
145	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
146	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
147	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI